

BAB I PENDAHULUAN

1. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Komisi I DPR RI yang membawahi bidang tugas Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, serta Komunikasi dan Informatika melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Kerajaan Belanda, Kerajaan Belgia, dan Republik Federasi Jerman pada tanggal 20-27 Juni 2010 untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap KBRI di Kerajaan Belanda, Kerajaan Belgia, dan Republik Federasi Jerman, serta meningkatkan hubungan dan kerja sama antara RI, Kerajaan Belgia, dan Republik Federasi Jerman dengan mengadakan pertemuan dengan kalangan Parlemen Eropa dan Parlemen Jerman.

2. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi I DPR RI ke Kerajaan Belanda, Kerajaan Belgia, dan Republik Federasi sebagai berikut:

1. Kemal Azis Stamboel	A-76	F-PKS	Ketua Delegasi
2. KRMT Roy Suryo Notodiprojo	A-505	F-PD	Anggota Delegasi
3. Mirwan Amir	A-416	F-PD	Anggota Delegasi
4. Ir. H. Hari Kartana, MM.	A-479	F-PD	Anggota Delegasi
5. Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	A-276	F-PG	Anggota Delegasi
6. Drs. Enggartiasto Lukita	A-216	F-PG	Anggota Delegasi
7. Tjahjo Kumolo	A-344	F-PDIP	Anggota Delegasi
8. H. Tri Tamtomo, S.H.	A-322	F-PDIP	Anggota Delegasi
9. Evita Nursanty	A-357	F-PDIP	Anggota Delegasi
10. Luthfi Hasan Ishaq, MA.	A-87	F-PKS	Anggota Delegasi
11. Ir. H. Azwar Abubakar, MM.	A-101	F-PAN	Anggota Delegasi
12. H. Achmad Daeng Sere, S.Sos.	A-318	F-PPP	Anggota Delegasi
13. Hj. Lily Chodidjah Wahid	A-160	F-PKB	Anggota Delegasi
14. Rachel Maryam Sayidina	A-26	F-Gerindra	Anggota Delegasi
15. Dra. Damayanti, M.Si.	-	-	Set. Delegasi
16. Angrek Kurnianti, S.H.	-	-	Set. Delegasi
17. Hamdani Djafar	-	-	Kemlu RI
18. Khotijahtus Sadiyah	-	-	Kemlu RI

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi adalah :

1. Melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap mitra kerja yaitu Kementerian Luar Negeri RI dalam hal ini khusus terhadap Kedutaan Besar RI di Kerajaan Belanda, Kerajaan Belgia, dan Republik Federasi Jerman.
2. Ikut memberikan kontribusi bagi peningkatan hubungan persahabatan bilateral Indonesia-Belgia dan Indonesia-Jerman.

4. JADWAL KUNJUNGAN

1. Senin, 21 Juni 2010 : Rapat Dengar Pendapat dengan Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belanda di Den Haag, JE Habibie beserta jajaran
2. Selasa, 22 Juni 2010 : - Kunjungan ke Vlissingen (salah satu tempat alutsista RI) di Belanda
- Rapat Dengar Pendapat dengan Kuasa Usaha Ad Interim dan Staf KBRI Brussel
- Pertemuan dengan *European Parliament-Indonesia Friendship Group*
3. Rabu, 23 Juni 2010 : - Pertemuan dengan Wakil Presiden Parlemen Eropa, Mr. Libor Roucek
- Pertemuan dengan Komite Luar Negeri Parlemen Eropa
- *Working Session* dengan Delegasi ASEAN
4. Kamis, 24 Juni 2010 : Kunjungan ke Perusahaan *OIP Sensor System*
5. Jumat, 25 Juni 2010 : - Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dubes LBBP RI untuk Republik Federasi Jerman, Eddy Pratomo, beserta jajaran
- Pertemuan dengan Anggota Komisi Luar Negeri Bundestag, Mr. Jürgen Klimke (Fraksi Partai CDU) dan Mrs. Edelgard Bulmahn (Fraksi Partai SPD)

BAB II
GAMBARAN TENTANG
NEGARA KUNJUNGAN

1. NEGARA KERAJAAN BELANDA

A. UMUM

Nama Resmi	:	Kerajaan Belanda/Kingdom of the Netherlands/ <i>Het Koninkrijk der Nederlanden</i>
Bentuk Negara	:	Monarki Konstitusional
Ibu Kota	:	Amsterdam
Pusat Pemerintahan	:	Den Haag
Kedudukan Geografis	:	Kerajaan Belanda terletak di Eropa Barat, muara dari tiga sungai terbesar di Eropa, yaitu Sungai Rhine, Meuse, dan Schelde
Luas Wilayah	:	41.526 km ² (terbagi atas 12 Provinsi dan 458 Kota)
Iklim	:	Beriklim sedang, temperatur tertinggi 23,60° C dan terendah 6 ° C
Kepala Negara	:	Ratu Beatrix Wilhelmina Armgard, dinobatkan pada tanggal 30 April 1980
Kepala Pemerintahan	:	Perdana Menteri Jan Peter Balkenende, terpilih pada 27 Mei 2003
Menteri Luar Negeri	:	Maxime Verhagen, dilantik pada 22 Februari 2007
Perbatasan	:	- Timur : Republik Jerman - Selatan : Kerajaan Belgia - Barat dan Utara : Laut Utara
Penduduk	:	16.783.092 jiwa (Juli 2010 est.), laju pertumbuhan 0,39 % (2010 est.)
Hari Nasional	:	30 April (<i>Queen's Day</i>)

Agama	:	Katholik 36%, Protestan 27%, dan sisanya penganut kepercayaan lain.
Bahasa	:	Bahasa Belanda dan Inggris
Mata Uang	:	Euro
Sumber Daya Alam	:	Gas alam, Minyak, Listrik, Kimia, batu dan pasir
Indikator Ekonomi (2009 est.)	:	- Inflasi : 1,2 % - GDP: US\$ 654,9 Milliar (2009 est.) - Pendapatan Perkapita: \$ 39.200 - Pertumbuhan ekonomi : -3,9 %

B. PERKEMBANGAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-BELANDA

- Beberapa capaian yang cukup menonjol dalam hubungan bilateral Indonesia-Belanda dalam kurun beberapa waktu terakhir, antara lain:
 1. Kehadiran Menlu Bernard Bot pada peringatan HUT Proklamasi RI pada tanggal 17 Agustus 2005 yang sekaligus menyampaikan penerimaan secara moral dan politik terhadap kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945
 2. Kerja sama dalam kasus Munir
 3. Kerja sama dalam mengantisipasi dampak negatif dari terbitnya hasil kajian sejarah Prof. Drooglever mengenai Pepera 1969
 4. Penandatanganan *Letter of Intent (LoI) on a Comprehensive Partnership Mechanism for Dialogue and Cooperation* RI-Belanda yang ditandatangani oleh Menlu kedua negara pada tanggal 18 Desember 2006
 5. Pamarafan *draft Joint Declaration by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands on a Comprehensive Partnership (JDCP)* oleh kedua Menlu pada bulan Januari 2009. *Joint Declaration* tersebut akan ditandatangani pada kunjungan Presiden RI ke Belanda pada Oktober 2010.

- Hubungan ekonomi Indonesia-Belanda:
 1. Volume perdagangan bilateral:
 - Tahun 2009: US\$ 3.463,12 juta (RI surplus sekitar US\$ 2.355,02 juta)
 - Tahun 2008: US\$ 4.529,13 juta (RI surplus sekitar US\$ 3.323,66 juta)
 2. Komoditi ekspor utama Indonesia ke Belanda Tahun 2009 antara lain: minyak kelapa sawit/CPO, timah batangan, peralatan transmisi radio-telepon dan radio-telegraf, furnitur, produk besi dan baja, kopra, mesin pemroses data otomatis, batubara, mesin-mesin percetakan, dan kayu yang digunakan untuk lantai, dan sebagainya.
 3. Nilai investasi Belanda di Indonesia untuk periode 1 Januari 1990 s/d Oktober 2009 mencapai USD 5.1 miliar mencakup 334 proyek.
 4. Indonesia-Belanda telah memiliki persetujuan Kerjasama Ekonomi (1968); Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B (1973 dan 1991); Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal/P4M (1994).
 5. Belanda adalah pemasok turis kedua terbesar dari Eropa Barat (setelah Inggris). Pada tahun 2008 jumlah wisatawan Belanda adalah 135,617 dan pada tahun 2009 jumlahnya meningkat 6,22% menjadi 144,059.

- Kerjasama konkrit Indonesia-Belanda, yaitu:
 1. Pemerintah Belanda telah memberikan bantuan penanggulangan bencana alam yaitu tsunami sebesar USD 767,2 juta; gempa bumi Jogjakarta sebesar USD 2,5 juta; dan lainnya (banjir di Jakarta) sebesar Euro 500 ribu (bantuan langsung) dan Euro 500 ribu melalui *International Organization for Migration* (IOM).
 2. Pemerintah Belanda mengalokasikan dana sekitar EUR 80 juta untuk kerja sama energi dengan Indonesia untuk periode 2007-2012.
 3. Sebagai salah satu negara yang mendukung pendirian *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC), Belanda telah memberikan bantuan dana sebesar 10,3 juta Euro (US\$ 16 juta) termasuk untuk kerja sama *capacity building*. Di samping itu Belanda juga menawarkan bantuan dalam pembuatan peraturan nasional yang berhubungan

dengan *transnational aspect of legislation*, misalnya aturan mengenai dokumen *arrest warrant* yang dapat berlaku untuk beberapa negara yang berkepentingan. Selain itu kedua negara juga sedang menjajaki kerja sama *Capacity Building* untuk kegiatan pengamanan di Bandara Indonesia.

4. Belanda juga telah memberikan bantuan bagi pengembangan kawasan Timur Indonesia baik berupa bantuan finansial maupun kerja sama *capacity building*, antara lain: *Program Media Development Loan Fund* (MDLF) untuk pembangunan media di Propinsi Maluku dan Papua; bantuan dana sebesar 24 juta Euro bekerjasama dengan Asian Development Bank dalam perbaikan kualitas pendidikan dasar di Timor Barat; mendukung program UNICED melalui dana sebesar 3,9 juta Euro untuk pengenalan mata pelajaran pencegahan penyakit HIV/AIDS di sekolah-sekolah di Propinsi Papua dan Irija.
- *Pending Issue:*
 1. Rencana Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Belanda, 6-8 Oktober 2010
 2. Penandatanganan Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands on Comprehensive Partnership (JDGP)
 3. Perjanjian Bebas Visa RI-Benelux (Belgia, the Netherlands, Luxembourg)
 4. *Arrangement between the Directorate General of Posts and Telecommunications, Ministry of Communication and Information technology of the Republic of Indonesia and the Directorate General of Telecommunications and Post, Ministry of Economic Affairs of the Kingdom of the Netherlands concerning Joint Issue of Stamps.*
 5. *Joint Policy Framework for Cooperation in the Field of Common Cultural Heritage of Indonesia and the Netherlands*
 6. Perjanjian Pembayaran Tunjangan Jaminan Sosial antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda

2. NEGARA KERAJAAN BELGIA

A. UMUM

Nama resmi	: Kingdom of Belgium
Bentuk Negara	: Demokrasi parlementer federal yang berada dibawah monarki konstitusional.
Ibu Kota	: Brussels
Luas Wilayah	: 30,230 km persegi
Batas-Batas Negara	: Utara: Belanda; Selatan: Perancis; Barat: Perancis dan Laut Utara; Timur: Jerman dan Luxembourg
Populasi	: 10,423,493 (July 2010 est.)
Bahasa	: Bahasa Resmi: Belanda dan Perancis Komposisi pengguna bahasa: Belanda (58%), Perancis (32%) dan Jerman (10%)
Sejarah Singkat	: Belgia merdeka dari Belanda pada tahun 1830 dan pada PD I dan PD II diduduki oleh Jerman. Negara ini merupakan negara Eropa yang memiliki teknologi maju dan moderen. Negara ini tergabung ke dalam anggota NATO dan Uni Eropa. Ketegangan antara negara bagian Flemings yang berbahasa Belanda di Utara dengan negara bagian Wallons yang berbahasa Perancis di Selatan telah mendorong adanya amendemen konstitusi yang menjamin adanya otonomi dan pengakuan terhadap masing-masing negara bagian.
Mata Uang	: Euro
Hari Nasional	: 21 Juli (Hari Kemerdekaan Belgia dari Belanda, 21 Juli 1831)
Kepala Negara	: Raja ALBERT II (sejak 9 Augustus 1993);
Kepala	: Perdana Menteri Yves Leterme (sejak 25

Pemerintahan	November 2009)
Menteri Luar Negeri	: Steven Vanackere, dilantik sejak 25 November 2009
System Politik	: Multi Partai, monarki Parlemerter
Indikator Ekonomi (2010)	: <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya alam: Batu bara dan Gas Alam • Mata Uang: Euro sejak Juli 2001 • G D P: \$381 miliar (2009 est.) • Pendapatan perkapita: \$36,600 (2009 est.) • Tingkat Pengangguran: 8.3% (2009 est.) Perdagangan luar negeri: ekspor \$296.1 miliar (2009 est.) engan impor \$315 miliar (2009 est.)

B. HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-BELGIA

- Hubungan ekonomi Indonesia-Belgia:
 1. Volume perdagangan bilateral:
 - Tahun 2009: US\$ 1.482,65 juta (RI surplus sekitar US\$ 613,97 juta)
 - Tahun 2008: US\$ 1.971,15 juta (RI surplus sekitar US\$ 730,79 juta)
 2. Komoditi utama ekspor non-migas Indonesia ke Belgia adalah: mesin, kayu, alas kaki, mebel dan pakaian jadi. Sementara itu, komoditi utama yang diimpor Indonesia dari Belgia adalah: bahan-bahan kimia, mesin-mesin, plastik/karet dan bahan tekstil.
 3. Total nilai investasi Belgia di Indonesia dari tahun 1990-2009 adalah senilai US\$ 393,2 dalam 56 proyek. Pada umumnya investasi Belgia di Indonesia bergerak di bidang perkebunan, keramik dan kaca, baja, farmasi, garmen dan tekstil.
 4. Jumlah wisatawan asal Belgia yang berkunjung ke Indonesia pada Tahun 2008 sebanyak 22.854 wisatawan.

- Kerjasama kongkrit Indonesia-Belgia:
 1. Pemerintah Belgia telah memberikan bantuan untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Indonesia sejak tahun 2003, melalui Belgian Official Development Assistance (ODA).
 2. Belgia melalui B-FAST (*Belgian First Aid & Support Team*) telah memberikan sejumlah bantuan untuk korban gempa bumi di Padang, September 2009. Bentuk bantuan yang diberikan antara lain adalah alat-alat pemurni air dan *health kit*.

- *Pending Issue*:
 1. Perjanjian Bebas Visa RI-Benelux (Belgia, the Netherlands, Luxembourg)
 2. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Belgia
 3. Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) RI- Belgium Luxembourg Economic Union (BLEU)
 4. Forum Konsultasi Bilateral RI-Belgia

3. NEGARA REPUBLIK FEDERASI JERMAN

A. UMUM

Nama Resmi	: Republik Federasi Jerman
Bentuk Pemerintahan	: Republik Federasi/Demokrasi Parlementer
Ibukota	: Berlin (sejak 3 Oktober 1990)
Kepala Negara	: (Sementara dijabat oleh Jens Bohrsen, Ketua Majelis Tinggi Jerman, sebelum pemilu baru pasca pengunduran diri Horst Kohler, 31 Mei 2010)
Pemerintahan	: Pemerintah koalisi "Hitam-Merah" antara CDU/CSU dan SPD (untuk masa Oktober 2005-Oktober 2009 di bawah Kanselir Angela Merkel (CDU/CSU) dan wakilnya Frank-Walter Steinmer (SPD)
Lembaga Negara	: - Eksekutif, kewenangannya diemban oleh Bundeskabinet (Kabinet Federal) yang dipimpin oleh Bundeskanzler (Kanselir Federal) dan Bundespresident (Presiden Federal)

	<ul style="list-style-type: none"> - Legislatif adalah Bundestag (Parlemen Federal) dan Bundesrat (Majelis Federal) - Yudikatif tertinggi dilaksanakan pada tingkat UUD oleh Bundesverfassungsgericht (Mahkamah Konstitusi Federal)
Letak	: Di Eropa Tengah, berbatasan dengan: Denmark, Laut Utara dan Laut Baltik di Utara, Swiss dan Austria di Selatan, Belanda, Luxemburg dan Perancis di Barat, Ceko, Slovakia dan Polandia di Timur.
Hari Nasional	: 3 Oktober (Hari Penyatuan Jerman)
Wilayah	: 357. 041 km ² ; panjang perbatasan = 3.758 km.
Penduduk	: 82,3 juta jiwa (Juli 2009, est.), Terdiri dari 91.5% Jerman, 2.4% Turki, 0.7% Italia, 0.4% Yunani, 0.4% Polandia, 4,6% lain-lain
GDP perkapita (PPP)	: US\$ 34,100 (2009, est.)
Mata Uang	: Euro (€)
Mitra Dagang Utama	: Perancis 10,2%, AS 6,7%, Belanda 6,7%, Inggris 6,6%, Italia 6,3%, Austria 6%, China 4,5%, Swiss 4,4% (2009, est.)
Ekspor Utama	: Mesin-mesin, kendaraan, bahan Kimia, logam dan manufaktur, bahan makanan dan tekstil
Impor Utama	: Mesin-mesin, kendaraan, bahan Kimia, bahan makanan dan tekstil
Industri Utama	: Besi, Baja, Otomotif, Semen, Kimia, Peralatan, Elektronik, galangan kapal, tekstil
Agama	: Katolik (31,4%), Protestan (31,1%), Muslim (4%), Yahudi (0,2%)
Bahasa Resmi	: Bahasa Jerman yang berakar dari bahasa Indo-Jerman sebagaimana bahasa Denmark, Swedia, Belanda, bahasa Inggris
Iklim	: Memiliki empat musim. Temperatur rata-rata 9°C. Pada bulan terdingin (Januari) temperatur antara 1,5°C di daratan rendah dan -6°C di daerah pegunungan dan

dimusim panas temperatur rata-rata 17-18°C

B. HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-JERMAN

1. Politik

- Secara umum, hubungan Indonesia-Jerman berlangsung dalam suasana bersahabat dan saling pengertian. Jerman mendukung integritas wilayah NKRI dan menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Jerman menghargai keberhasilan Indonesia dalam penandatanganan MoU dengan GAM. Namun, masih terdapat sejumlah kalangan di dalam negeri Jerman (khususnya LSM) yang menilai negatif dan mempertanyakan kesungguhan tekad Pemerintah RI dalam memajukan proses reformasi dan demokratisasi, termasuk penegakan HAM dan perlindungan lingkungan hidup.
- Dalam bidang pemerintahan, Jerman memberikan bantuan dalam proses perumusan dan pelaksanaan Otonomi Daerah, *good governance* (pemberantasan korupsi dan administrasi kependudukan), pelatihan diplomatik, reformasi hukum persaingan usaha, *capacity building* dalam rangka penguatan lembaga demokrasi, seperti Parlemen, wartawan, MK/MA, dan LSM melalui *executing agencies* Pemerintah Jerman.

2. Ekonomi

- Volume perdagangan Indonesia-Jerman pada Tahun 2009 sejumlah 4,185 M Euro dengan surplus untuk Indonesia sejumlah 1,2 M Euro.
- Impor Utama Jerman dari Indonesia, antara lain: minyak dari kelapa sawit dan lemak, kopi, tembakau, karet mentah, kayu, meubel, produk dari kayu, pakaian jadi, sepatu, produk dari karet, mesin perkantoran, peralatan listrik, alat komunikasi, televisi, dan komponen elektronik.
- Tahun 2009, investasi Jerman di Indonesia berjumlah 18 proyek dengan nilai US\$ 104,2 juta. Bidang usaha yang diminati oleh perusahaan Jerman di Indonesia adalah industri kimia, industri baja/logam, perdagangan umum, jasa dan industri pariwisata, antara lain sektor hotel/restaurant.

3. Sosial, budaya, dan penerangan
Terlihat dalam bentuk misi budaya dan kesenian Indonesia ke Jerman dan sebaliknya.
4. Protokol dan konsuler
Saat ini tengah diupayakan rencana usul pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas kedua negara.
5. Pendidikan, riset, dan iptek
Saat ini lebih dari 25.000 mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di Jerman. Jerman memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia melalui DAAD/Lembaga Pertukaran Akademik Jerman dan memberikan pembiayaan studi yang bersifat *co-financing*.
6. Pertahanan dan keamanan
Program kerja sama RI-Jerman di bidang pertahanan untuk Tahun 2009, antara lain:
 - Kerjasama Polisi Militer (penyiapan pasukan perdamaian, *Expert talk* bidang *disaster relief*, Pelatihan UN/PC di Pusat Pendidikan NATO Hammelburg, Pertukaran delegasi untuk *review* kurikulum IDU (*Indonesian Defence University*), *Expert talk military law* di Indonesia, *Civic education training* di Strausberg, Jerman, *Bilateral Consultation* Jerman-Indonesia untuk pembahasan program Tahun 2010 di Berlin
 - Bantuan pelatihan termasuk kursus pelajaran bahasa, polisi militer, teknisi kapal selam, *meteorology*, *maritime surveillance*, Nubika, dan *joint warfare*

BAB III HASIL KUNJUNGAN

1. KUNJUNGAN KE KERAJAAN BELANDA

A. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Belanda di Den Haag, JE Habibie, beserta jajarannya

1. Ketua Delegasi menyampaikan bahwa RDP dengan Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belanda bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai perkembangan politik dalam negeri Belanda khususnya terkait dengan hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Belanda di berbagai bidang, kinerja KBRI Den Haag dalam meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara, peluang-peluang kerja sama di masa datang, serta beberapa isu terkait dengan gerakan RMS dan Papua Merdeka di Belanda.
2. Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belanda memaparkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Capaian tertinggi diplomasi Indonesia di Belanda ditandai oleh pengakuan (secara moral dan politik) Pemerintah Belanda yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Belanda H.E Bernard Bot pada tahun 2005 atas kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai refleksi pengakuan tersebut dan kedekatan hubungan kedua negara, untuk pertamakalinya dalam sejarah hubungan bilateral Indonesia-Belanda, PM Belanda Balkenende bersama beberapa jajarannya hadir dalam resepsi perayaan HUT RI tahun 2008 di Wisma Duta.
 - b. Hubungan kerja sama bilateral dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Di sektor pariwisata, jumlah wisman Belanda ke Indonesia meningkat menjadi 145.000 orang. Di sektor perdagangan, volume perdagangan kedua negara tahun 2009 mencapai ± US\$ 4 milyar, lebih dari separuhnya adalah positif untuk Indonesia.
 - c. 3 (tiga) permasalahan yang menjadi perhatian KBRI di Belanda, yaitu:
 - 1). RMS
 - 2). OPM

- 3). Perekonomian
- d. Upaya yang telah dilakukan KBRI dalam menangani permasalahan tersebut di atas:
 - 1). Proaktif melakukan berbagai pendekatan budaya kepada kelompok-kelompok garis keras yang ada di Belanda, seperti pada bulan April 2010, untuk kedua kalinya KBRI mendatangkan tim kesenian Pelagandong dari Ambon dan mengadakan pertunjukan seni-budaya di beberapa kota di Belanda. Pendekatan budaya ini dipandang sangat bijak dan mendapat sambutan yang sangat positif, bahkan banyak diantara mereka yang sudah mendukung NKRI.
 - 2). Membangkitkan kembali *loyalty* dan rasa hubungan kekeluargaan orang Ambon.
 - 3). Bertemu dengan tokoh utama OPM di Belanda, yaitu Nicolas Jouwe (86 tahun) dan berhasil mengajaknya untuk kembali ke Indonesia. (Nicolas Jouwe kembali ke Indonesia pada minggu pertama Desember 2009)
 - 4). Mempromosikan pariwisata dan kuliner Indonesia kepada 1.7 juta WN Belanda yang mempunyai ikatan emosi dengan Indonesia, dengan menyelenggarakan Pasar Malam Indonesia (pertama kali dilakukan pada bulan April 2010, dikunjungi lebih dari 30.000 orang, dan dijadikan kegiatan promosi tahunan karena besarnya animo masyarakat).
3. Delegasi menyampaikan apresiasinya terhadap hasil kinerja Dubes RI dan jajarannya, yang telah sukses memanfaatkan peluang dan melakukan terobosan dalam diplomasi Indonesia di Belanda. Disamping itu, Delegasi menyampaikan beberapa catatan tambahan untuk KBRI Den Haag, yaitu:
 - a. Kemungkinan untuk melakukan peninjauan kerja sama kota kembar (*sister city*) antara Amsterdam dengan Jakarta khususnya dalam hal penanganan sistim irigasi.
 - b. Peningkatan kerja sama, terutama di bidang teknik sipil
 - c. Peninjauan kerja sama militer yang pernah dilaksanakan dengan kota Breda namun terhenti sampai sekarang
 - d. Kontinuitas pendekatan hubungan dengan generasi muda RMS dan Papua Merdeka.

B. Kunjungan ke Damen Schelde Naval Shipbuilding di Vlissingen, Belanda

1. Perusahaan Royal Schelde berdiri pada Tahun 1875 dan merupakan perusahaan yang memproduksi kapal untuk AL dan komersial. Pada saat ini, Perusahaan Royal Schelde bersama dengan “*sister companies*”nya Damen Shipyards Group memproduksi kapal AL dan kapal patroli dengan ukuran 10-200 meter, yang digunakan oleh AL, polisi laut, dan badan pemerintahan lainnya, dari Belanda sampai Jamaika dan dari Inggris sampai Afrika Selatan.
2. Kegiatan Damen Schelde Naval Shipbuilding, yaitu:
 - a. Memproduksi Sigma surface combatants, OPV’S, enforcer amphibious support ships, dan naval auxiliaries
 - b. Refits dan conversions kapal AL
3. Dalam kunjungan ke Damen Schelde Naval Shipbuilding, Delegasi mendapatkan kesempatan berkeliling ke tempat pembuatan kapal untuk melihat secara langsung pembuatan kapal-kapal yang diproduksi oleh Damen Schelde Naval Shipbuilding.
4. Pihak Damen Schelde Naval Shipbuilding menyampaikan bahwa pihaknya selama ini telah bekerjasama dengan Departemen Pertahanan Indonesia untuk mensuplay kapal-kapal yang dibutuhkan oleh TNI AL dan berharap kerja sama ini terus dapat berlangsung.

2. KUNJUNGAN KE KERAJAAN BELGIA

A. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kuasa Usaha Ad Interim dan Staf KBRI Brussel

1. Dalam RDP dengan KUALI dan Staf KBRI Brussel, Delegasi menanyakan mengenai persiapan program kunjungan Presiden RI ke Brussel dalam rangka menghadiri KTT ASEM ke-8 pada Oktober 2010 dan kemungkinan bagi Presiden RI untuk memberikan Pidato di depan Parlemen Eropa.

2. Menjawab pertanyaan Delegasi, KUI RI Brussel menyampaikan bahwa sampai saat ini KBRI Brussel terus melakukan persiapan dan berkoordinasi dengan pihak Belgia maupun dengan pihak pusat. Terkait dengan kemungkinan Presiden RI memberikan Pidato di Parlemen Eropa, KUI menyampaikan bahwa undangan bagi Presiden RI untuk memberikan pidato di depan PE yang telah dilayangkan sejak beberapa tahun lalu masih terbuka. Dalam kaitan dengan hal tersebut, KBRI Brussel telah menyampaikan ke Pusat mengenai waktu yang diusulkan oleh pihak Parlemen Eropa yaitu tanggal 6 oktober 2010 pukul 12.00, pada waktu Sidang Pleno Parlemen Eropa di Brussel.
3. Sampai saat ini pos Dubes di KBRI Brussel masih menunggu penempatan Dubes baru.
4. Kerja sama antara *local staff*, *home staff*, dan Atnis berjalan dengan baik.
5. Beberapa masalah yang menjadi kendala di KBRI Brussel, yaitu:
 - a. Masih kurangnya biaya pemeliharaan aset-aset KBRI
 - b. Banyaknya barang-barang inventaris KBRI yang telah usang dan rusak yang harus dihapuskan

B. Pertemuan dengan *European Parliament-Indonesia Friendship Group (EIFG)*

Dalam pertemuan antara Delegasi dan EIFG, KUI Brussel dalam sambutannya menyampaikan bahwa EIFG yang diluncurkan kembali tanggal 24 Maret 2010 merupakan Forum Anggota Parlemen kedua pihak untuk berdialog secara lebih terbuka mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Hubungan RI-UE seharusnya dapat lebih ditingkatkan dari segi *people to people contact*, mengingat telah terjalinnya hubungan yang sangat erat di bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Pada saat sekarang, terdapat sekitar 750 perusahaan Eropa yang melakukan investasinya di Indonesia dengan nilai sebesar 200 M Euro. Di bidang demokratisasi, Indonesia memiliki posisi yang sejajar dengan Eropa, mengingat saat ini Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan merupakan negara terbesar pertama yang melakukan pemilihan langsung Presiden.

C. Pertemuan dengan Wakil Presiden Parlemen Eropa, Mr. Libor Roucek, Komite Luar Negeri Parlemen Eropa, dan *Working Session* dengan Delegasi ASEAN

1. Dalam pertemuan tersebut, Co-Chair mempersilahkan pihak eksekutif dari masing-masing pihak untuk menyampaikan penjelasan singkat mengenai hubungan bilateral Indonesia-UE.
2. Terkait dengan hal itu, KUALI Brussel menyampaikan bahwa hubungan bilateral RI-UE telah berlangsung sekitar 30 tahun, kedewasaan hubungan tersebut ditandai dengan diselenggarakannya dialog oleh berbagai pihak, termasuk *Human Rights Dialogue* dan UE-Indonesia *Business Dialogue*. Kedua pihak juga telah menandatangani *Partnership and Cooperation Agreement* serta telah melakukan berbagai pertemuan dan dialog diantara pejabatnya, bahkan selama tiga tahun terakhir telah dilakukan pertemuan tingkat tertinggi antara Presiden RI dengan Presiden Komisi Eropa hampir setiap tahun.
3. Pihak PE menjelaskan mengenai situasi akhir di UE, antara lain mengenai UE yang sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk keluar dari krisis, yang dikhawatirkan akan berdampak pada krisis sosial. Beberapa Anggota PE berpandangan bahwa masalah terbesar yang sedang dihadapi UE adalah pengaturan pasar uang serta masalah demografi (rendahnya tingkat kelahiran dan tingginya usia warga). Mengenai pengaturan pasar uang, dikatakan bahwa UE tampaknya harus berusaha untuk membentuk UE *Common Rules*, sehingga memudahkan upaya untuk mengatasi berbagai tantangan, khususnya di saat krisis seperti sekarang. Selain itu, dengan adanya masalah demografi, UE harus mengupayakan adanya kebijakan *social productivity* yang telah dicanangkan melalui *Lisbon Strategy* terkait kebijakan sosial dan ketenagakerjaan.
4. Dalam sesi tanya jawab, beberapa Anggota UE menanyakan tentang standar HAM di ASEAN, kemungkinan akses Timor Leste dalam ASEAN, kemungkinan adanya Mahkamah HAM sebagaimana dilakukan oleh UE, serta harapan agar Indonesia dapat membantu terciptanya penghormatan HAM di Myanmar.

5. Menanggapi pertanyaan beberapa Anggota UE tersebut, Delegasi menyampaikan bahwa sebagai negara yang mendukung dan mengedepankan promosi HAM, Indonesia mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan penghormatan HAM di wilayah ASEAN dan Asia. Hal ini dibuktikan dengan keketuaan dan keanggotaan Indonesia dalam *UN Council on Human Rights*. Disamping itu, Delegasi juga menegaskan bahwa keberhasilan ASEAN untuk membentuk *Inter-Government Commission on Human Rights* merupakan raihan yang patut dihargai mengingat tingkat pemahaman mengenai HAM di ASEAN masih belum sama. Terkait dengan kemungkinan akses Timor Leste dalam ASEAN, Delegasi menyampaikan bahwa apabila seluruh persyaratan yang ada telah dipenuhi oleh pihak Timor Leste, Indonesia akan mendukung keanggotaannya di ASEAN.
6. Mengenai *Lisbon Treaty* yang telah diberlakukan pada Desember 2009, beberapa Anggota PE menyampaikan kekesalannya mengenai belum jelasnya posisi PE dalam sistem pengambilan keputusan UE. Memang benar bahwa *Lisbon Treaty* telah memberikan porsi yang jauh lebih besar kepada PE untuk turut menjadi bagian utuh dari pengambilan keputusan UE, termasuk di bidang pertanian dan hubungan luar negeri. Namun kenyataannya, pihak eksekutif masih saja membuat kebijakan sejauh kepentingannya tanpa mempertimbangkan pendapat PE.
7. Terkait dengan integrasi UE, beberapa Anggota PE menyampaikan penghargaan dan penghormatan kepada Indonesia atas keberhasilan Pemilu dan sistem demokrasi di Indonesia dan mengakui dengan rendah hati bahwa partisipasi warga Eropa dalam Pemilu Eropa masih sangat rendah dan harus belajar banyak dari Indonesia mengenai upaya untuk menjaring warga menjadi bagian dari proses demokrasi di wilayah Eropa.
8. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Delegasi menyampaikan undangan kepada Anggota PE dan EIFG untuk melakukan kunjungan ke Indonesia, selain untuk mengetahui secara langsung kondisi yang sesungguhnya di Indonesia juga untuk lebih mempererat persahabatan kedua belah pihak yang telah terjalin selama ini.

D. Kunjungan ke Perusahaan *OIP Sensor System*

1. Dalam kunjungan ke Perusahaan *OIP Sensor System*, Delegasi diterima oleh *Vice President International Programme*, Mr. Stefaan Walravens dan *International Sales Manager*, Mr. Clement Falanga. Selain mendengarkan presentasi, Delegasi mendapat kesempatan berkeliling ke beberapa *workshop* untuk melihat secara langsung pembuatan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan *OIP Sensor System*.
2. *OIP Sensor System* berdiri 100 tahun yang lalu dan memproduksi berbagai alat kelengkapan militer maupun sipil, seperti mikroskop, kaca pembesar, sensor suhu, sensor laser, teropong untuk panser, dan lain-lain.
3. Pihak *OIP Sensor System* menyampaikan bahwa pihaknya selama ini bekerjasama dengan beberapa pihak di Indonesia dan mengharapkan dapat mengembangkan kerja sama yang lebih luas lagi dengan Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu, disampaikan bahwa sebelumnya pada tanggal 10-11 Juni 2010 rombongan TNI AD dan Direktur PT. Pindad telah melakukan kunjungan ke *OIP Sensor System* untuk melakukan *technical observation* terkait dengan rencana TNI AD untuk memperbaiki peralatan militer milik TNI AD.

3. KUNJUNGAN KE REPUBLIK FEDERASI JERMAN

A. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dubes LBBP RI untuk Republik Federasi Jerman

1. Dalam RDP dengan Dubes LBBP RI untuk Republik Federasi Jerman, Dubes memaparkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Arti penting kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Jerman, yaitu:
 - 1). Sebagai forum komunikasi
 - 2). Membuka peluang kerja sama
 - 3). Dukungan misi Perwakilan RI
 - 4). Pembentukan Grup Kerjasama Bilateral Antar Parlemen RI dan Parlemen Jerman

- b. Isu Global yang menjadi perhatian utama Jerman, yaitu:
- 1). *Climate change/energy*
 - 2). *Financial crisis*
 - 3). Terorisme
 - 4). Proses perdamaian Timur Tengah
 - 5). Nuklir Iran
- c. Politik luar negeri Jerman berdasarkan perdamaian dunia, *social justice*, *democracy*, dan HAM. Jerman berperan aktif dalam organisasi UE, PBB, NATO, G-8, dan G-20. Kebijakan politik Jerman terhadap Asia masih fokus pada India dan Cina.
- d. Kegiatan Perwakilan RI pada tahun 2009-2010, yaitu:
- 1). *Interministerial meeting on research and technology*
 - 2). UNFCCC
 - 3). Hibah harapan *rainforest*
 - 4). Konsultasi bilateral kerja sama pembangunan
 - 5). Forum konsultasi bilateral
 - 6). *Interfaith Dialogue* RI-Jerman
 - 7). *International Tourismus Borse 2010*
 - 8). Pameran COTECA 2010
- e. Rencana Aksi Perwakilan RI pada 2010-2012
- 1). *Kick off diplomacy*
 - Eksplorasi dan optimalisasi kerja sama di semua bidang
 - Promosi trade, tourism, investment and services
 - Diplomasi publik
 - Optimalisasi IT
 - Pelayanan prima perlindungan WNI dan BHI
 - Benah diri Perwakilan
 - 2). Bidang politik
 - FKB 2011 di Jerman
 - *Interfaith dialogue* di Jerman 2011
 - Kerja sama hukum
 - *Caucus/Grup* kerja sama bilateral antar Parlemen RI-Jerman di Bundestag
 - Diseminasi informasi
 - 3). Bidang ekonomi-perdagangan
 - Kerja sama *renewable energy* dan *climate change*

- Tindak lanjut negosiasi bilateral di bidang kerja sama pembangunan
 - *Renews*-Oktober 2010
 - Promosi terpadu Travel Technology Initiative (TTI) Oktober 2010 di Munchen (Indonesian Day)
 - Temu bisnis di bidang *energy* di Hamburg-November 2010
- 4). Bidang sosial budaya
- *International tourism borse* 2011
 - Jakarta Berlin *Art Festival* 2011
 - Pertemuan Besar PPI seluruh Jerman dalam rangka memberikan sumbangan kepada Pemri
 - Pertemuan dengan DIG/DIV seluruh Jerman
- 5). Bidang konsuler dan imigrasi
- *One hour service*
 - Komputerisasi data WNI
 - Mewujudkan perjanjian bebas visa paspor diplomatik dan dinas RI-Jerman
 - Kerja sama keimigrasian (*capacity building*)
- 6). Bidang pendidikan dan riptek
- Kerjasama program *double-degree*
 - Tindak lanjut *interministerial meeting on* RI-Jerman
 - Kerjasama *geothermal*
 - Rencana pembentukan *maritime university*
 - Kerjasama di bidang *vocational education*
 - Mendukung konferensi RENEWS 2010-PPI (*renewable energy*)
- 7). Bidang Hankam
- Singgah KRI Dewa Rutji 2010 di Bremen
 - Modernisasi Alutsista TNI
 - Rencana perjanjian kerja sama pertahanan
 - Pengembangan *Indonesian Defence University*
 - Kerjasama kepolisian
- f. *Pending matters:*
- 1). Rencana pembangunan gedung KBRI Berlin yang baru (di atas tanah Pemri di Tiergartenstr).
 - 2). Proses pengadaan arsitek dan manajemen konstruksi
 - 3). Tahapan proses sampai dengan saat ini termasuk yang masih harus dilakukan sebelum memasuki fase konstruksi.

- 4). Penanganan aset Pemri yang berlokasi di Bonn (gedung eks-KBRI dan Wisma RI Bonn) dan Berlin (tanah di Hermann Hesse Str).
2. Dalam sesi tanya jawab, Delegasi menyampaikan beberapa pertanyaan dan catatan tambahan untuk KBRI Jerman, yaitu:
 - a. Fokus kerja sama RI-Jerman, khususnya di bidang *Climate Change* dan kemungkinan pengadaan kapal feri ke-25 oleh Jerman.
 - b. Penanganan dampak krisis keuangan global oleh Pemerintah Jerman.
 - c. Masukan dalam rangka penyusunan RUU Protokol yang baru.
 - d. Penanganan isu Papua dan Aceh di Jerman (Catatan: DPRA, partai Aceh telah diundang ke Jerman oleh Yayasan Politik Jerman Friedrich Ebert Stiftung dalam rangka *study tour* mengenai politik di Jerman).
 - e. Terkait pembangunan gedung KBRI Berlin yang baru, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada Raker Komisi I DPR RI mendatang.
 - f. Modernisasi alutsista Jerman.

B. Pertemuan dengan Anggota Komisi Luar Negeri Parlemen Federal Jerman (Bundestag), Mr. Jürgen Klimke (Fraksi Partai CDU-Christian Democrat) dan Mrs. Edelgard Bulmahn (Fraksi Partai SPD-Social Democrat)

Adapun pokok-pokok masalah yang dibicarakan, antara lain:

1. Peran penting Indonesia pada tataran regional dan global (*global governance*, upaya pencapaian MDGs)
2. Proses demokratisasi di Indonesia
3. Upaya dan peran G8 dan G20 dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem perekonomian dunia
4. Isu penanganan pemanasan global (*climate change*) dan perlindungan lingkungan hidup.
5. Proses demokratisasi di Indonesia
6. Bantuan dan kerja sama RI-Jerman di bidang pendidikan dan riset (*bio technology, maritime technology*, Perikanan dan Pendidikan Kejuruan)
7. Upaya kedua negara dalam meningkatkan pemahaman, toleransi antar keyakinan melalui dialog lintas agama.

8. Peran Pemerintah Jerman dalam memajukan integrasi kalangan muslim dan non muslim Jerman melalui dialog.
9. Pengembangan minyak kelapa sawit (*palm oil*) dan *sustainable palm oil production*.
10. Penjajakan pembentukan *Causus*/Grup kerja sama bilateral antar Parlemen RI-Jerman di Bundestag
11. Proses pemberian/pelayanan visa Jerman di Kedubes Jerman di Jakarta bagi Anggota Delegasi DPR RI dan pejabat yang akan berkunjung ke Jerman.

4. LAIN-LAIN

Dalam perjalanan pulang ke tanah air, 2 (dua) orang Anggota Delegasi, yaitu Sdr. Kemal Aziz Stamboel dan Sdr. Enggartiasto Lukita melakukan kunjungan ke Markas Komisi Persiapan Organisasi Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir (PrepCom CTBTO) di Wina, Austria untuk memenuhi undangan Sekretaris Eksekutif CTBTO, Ambassador Tibor Toth. Adapun hasil kunjungannya adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Eksekutif CTBTO, Ambassador Tibor Toth menyampaikan beberapa hal pokok sebagai berikut:
 - a. Meskipun pada masa kepemimpinannya di CTBTO sudah ada negara *Annex II* lainnya yang meratifikasi (Columbia), akan tetapi pengumuman ratifikasi oleh Indonesia, pemain penting didalam isu *global nuclear disarmament*, memiliki arti penting tersendiri dan diyakini akan memiliki pengaruh jauh lebih luas (*domino effect*) dan memperbesar prospek *entry into force* CTBT.
 - b. Dari komunikasi dengan negara-negara *Annex II* lainnya, langkah Indonesia ini mendapatkan perhatian khusus (*closely observed*) oleh negara-negara *Annex II* dan mendorong munculnya pertimbangan-pertimbangan baru di kalangan negara-negara tersebut.
 - c. Sangat terkesan oleh pernyataan Menlu RI di depan Komisi I DPR RI bulan April 2010, dan pernyataan Menlu RI pada kesempatan pembukaan Pameran CTBTO di New York, 4 April 2010. Pernyataan terakhir dianggap sangat mengena (*punchy*) dan telah menjadi salah satu rujukan resmi CTBTO pada berbagai kesempatan terkait dengan upaya mendorong ratifikasi CTBT.

2. Ketua Komisi I DPR RI menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:
 - a. Mendukung sepenuhnya keputusan Pemri untuk meratifikasi CTBT sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Meskipun bulan Juli dan Agustus adalah bulan yang sangat sibuk bagi DPR RI, akan tetapi DPR RI akan memprioritaskan proses ratifikasi CTBT jika Pemri telah menyelesaikan proses di tingkat pemerintah.
 - b. Indonesia adalah *faithful party* terhadap semua traktat dan konvensi di bidang nuklir, karena Indonesia sejatinya menganggap perdamaian dunia yang abadi, sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, hanya dapat dicapai jika dunia bebas dari senjata nuklir.
 - c. DPR RI mendukung kepemimpinan Indonesia didalam isu *nuclear disarmament and non-proliferation*, akan tetapi pada saat yang sama menekankan pentingnya jaminan atas hak dasar (*inalienable rights*) untuk memanfaatkan nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Guna menghindari standar ganda, DPR RI juga mendesak CTBTO untuk mendorong negara-negara *Annex II* lainnya yang belum meratifikasi, khususnya negara-negara yang jelas-jelas telah memiliki senjata nuklir.
3. Terkait dengan aspek hukum, dari hasil diskusi dengan Ms. Lisa Tabasi, *Chief for Legal Affairs*, dicatat bahwa meskipun CTBT menyebut mengenai CTBTO, akan tetapi tidak menyebut mengenai PrepCom CTBTO. PrepCom CTBTO hanya dibentuk berdasarkan Resolusi SMU PBB 50/245 tahun 1996. Karena itu, ratifikasi CTBT tidak dengan sendirinya berimplikasi adanya pengakuan terhadap eksistensi hukum PrepCom CTBTO. Terkait dengan hal ini, dari diskusi tersebut direkomendasikan agar RUU/Nota ratifikasi oleh Indonesia secara khusus memuat klausul mengenai pengakuan terhadap eksistensi PrepCom CTBTO. Hal ini karena Pemri masih akan melakukan sejumlah tindakan hukum dengan PrepCom CTBTO (*facility agreement, cooperation for capacity building, dll*) hingga saat CTBT nantinya *entry into force*.
4. Pada kesempatan *wrap up session*, Ambassador Toth kembali menyampaikan keyakinannya mengenai pengaruh luas yang akan ditimbulkan oleh pengumuman ratifikasi Indonesia. Selain itu,

Ambassador Toth juga menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Menawarkan bantuan PrepCom CTBTO didalam proses ratifikasi Indonesia, termasuk dukungan dalam bentuk penyediaan berbagai bahan publikasi bagi pemangku kepentingan nasional.
 - b. Menawarkan Indonesia untuk memanfaatkan skema peningkatan kapasitas yang saat ini dimiliki CTBTO. Dalam kaitan ini diindikasikan bahwa PrepCom CTBTO telah menerima komitmen bantuan pendanaan yang cukup besar dari negara-negara donor bagi keperluan tersebut.
 - c. Meminta bantuan Indonesia untuk menggunakan kepemimpinannya, khususnya di kalangan negara-negara GNB, untuk mendorong ratifikasi dan *entry into force* CTBT.
 - d. Menginformasikan bahwa pada tanggal 22 atau 23 September 2010, akan berlangsung *CTBTO Ministerial Meeting* di New York. Sekiranya Indonesia mengharapkan gaung yang luas dari ratifikasinya terhadap CTBT, momentum tersebut dipandang sangat baik untuk mengumumkan dan menyerahkan instrument ratifikasi, karena bertepatan dengan SMU PBB ke-65.
5. Terdapat kesamaan pandangan antara Sekretaris Eksekutif CTBTO dengan Ketua Komisi I DPR RI mengenai keperluan untuk memanfaatkan momentum *CTBTO Ministerial Meeting* pada tanggal 22 atau 23 September 2010 sebagai kesempatan untuk mengumumkan dan menyerahkan instrument ratifikasi CTBT oleh Pemerintah Indonesia.
 6. Ketua Komisi I DPR RI berharap agar Pemri dapat menempatkan orangnya pada posisi-posisi senior di Sekretariat CTBTO, khususnya di unit-unit yang terkait dengan pembuatan/koordinasi kebijakan.

BAB IV SARAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kerajaan Belanda, Kerajaan Belgia, dan Republik Federasi Jerman, Delegasi menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar KBRI Belanda melakukan peninjauan kerja sama kota kembar (*sister city*) antara Amsterdam dengan Jakarta, kerja sama militer dengan kota Breda, peningkatan kerja sama, terutama di bidang teknik sipil, dan kontinuitas pendekatan hubungan dengan generasi muda RMS dan Papua Merdeka.
2. Perlunya penambahan anggaran untuk KBRI di Brussel, khususnya untuk perawatan aset-aset KBRI dan perlu adanya peraturan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang lebih singkat agar barang inventaris KBRI yang telah usang/rusak dapat segera dihapus dan diganti dengan yang baru.
3. Agar rencana pembangunan gedung KBRI Berlin yang baru (di atas tanah Pemri di Tiergartenstr) dan penanganan aset Pemri yang berlokasi di Bonn (gedung eks-KBRI dan Wisma RI Bonn) dan Berlin (tanah di Hermann Hesse Str) segera dilaksanakan.
4. Mengenai hasil pertemuan Delegasi dengan Parlemen Eropa dan 2 (dua) orang Anggota Komisi Luar Negeri Parlemen Federal Jerman (Bundestag) agar disampaikan kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Luar Negeri Delegasi Komisi I DPR RI ke Kerajaan Belanda, Kerajaan Belgia, dan Republik Federal Jerman yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsinya sekaligus meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara yang saling menguntungkan dan tentunya juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sebelum mengakhiri laporan ini, maka segenap Delegasi Komisi I DPR RI ke Kerajaan Belanda, Kerajaan Belgia, dan Republik Federal Jerman mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran Delegasi, terutama kepada Dubes RI beserta staf KBRI di Den Haag, KUI dan Staf KBRI Brussel, serta Dubes RI dan Staf KBRI di Jerman, termasuk instansi-instansi yang telah membantu Delegasi.

Jakarta, 28 Juni 2010
KETUA DELEGASI

Ttd.

KEMAL AZIS STAMBOEL
A- 76